

pertanggungjawaban sosial perusahaan, senilai USD 3-5 juta atau setara Rp 25,5 miliar (kurs Rp 8.500/USD 1), jika kemudian tawaran ini diterima maka paling tidak masing-masing penduduk yang terkena dampak langsung pencemaran Laut Timor hanya mendapatkan kompensasi dana sebesar Rp 500.000 (<http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/4020>). Dana sebesar itu tentu tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami selama dua tahun belakangan ini. Paling-paling dana tersebut cukup untuk membeli beras sebanyak 100 kg. Itupun dengan asumsi bahwa beras yang dibeli harganya tidak lebih dari Rp.5000/kg.

Kementrian Luar Negeripun hingga sekarang belum mampu mengambil langkah progresif. Sampai saat ini Kemenlu masih menunggu laporan dari Tim Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang telah mengunjungi Darwin, Australia. Alasannya karena Kemenhub merupakan *focal point* dalam MoU *Cooperation on oil Response Preparedness* dengan Australia pada tahun 1996, maka laporan Kemenhub tersebut sangat diperlukan dalam pembuatan nota diplomatik oleh Kemenlu ([http://www.deplu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalDetail-PersBriefingLike.aspx?l=-id&ItemId=b0a08755-b79a-4d71-a4a0-1dc4e8feec08](http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PersBriefingLike.aspx?l=-id&ItemId=b0a08755-b79a-4d71-a4a0-1dc4e8feec08)). Sebenarnya Kemenlu dapat saja membuat nota diplomatik dengan berkoordinasi dengan Kementrian atau badan-badan lain yang terkait. Dengan pertimbangan bahwa peristiwa meledaknya kilang minyak *West Atlas Montara* adalah peristiwa urgen, yang membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan.

Apapun alasannya, yang jelas pencairan ganti rugi akibat peristiwa meledaknya kilang minyak *West Atlas Montara* harus segera direalisasikan. Pemerintah Indonesia sebagai otoritas tertinggi negara haruslah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat NTT yang tinggal di daerah perbatasan terkesan diabaikan dan cenderung dibiarkan terkatung-katung nasibnya. Ada baiknya Pemerintah Indonesia belajar dari Pemerintah Amerika Serikat, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang serupa. Yang paling penting sekarang adalah komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, dan bukan mempertentangkan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Rasanya kurang arif jika kita hanya mampu mempertentangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam insiden ini, karena pertentangan pada dasarnya justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih